

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Review Penelitian Terdahulu

Mustakim et al., (2023) melakukan penelitian berjudul "PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN DAN KETERSEDIAAN ANGGARAN KAS TERHADAP OPTIMALISASI REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN". Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, untuk menganalisis pengaruh secara simultan dan parsial dari Perencanaan Anggaran (X1) dan Ketersediaan Anggaran Kas (X2) terhadap Optimalisasi Realisasi Penyerapan Anggaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan anggaran dan ketersediaan anggaran kas berpengaruh signifikan secara simultan.

Mugiati, (2018) melakukan penelitian berjudul "PENGARUH ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH". Metode analisis data yang digunakan adalah kuantitatif, karena permasalahannya merupakan penyimpangan yang tidak terjadi, antara aturan dan pelaksanaan, antara teori dan praktek antara rencana dan pelaksanaan. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial anggaran Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan dan realisasi Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Secara simultan Anggaran Pendapatan Asli Daerah dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Dalam perhitungan yang dilakukan menunjukkan Anggaran dan realisasi Pendapatan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan daerah lima tahun terakhir (2012-2016).

Mbado & Mbate, (2022) melakukan penelitian mengenai "PENGARUH PERENCANAAN DAN IMPLEMENTASI TERHADAP REALISASI ANGGARAN DENGAN KEBIJAKAN PERUBAHAN ANGGARAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA DINAS KESEHATAN KOTA KUPANG". Metode analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Variabel perencanaan berpengaruh signifikan terhadap variabel kebijakan perubahan anggaran Dinas Kesehatan Kota Kupang, Variabel perencanaan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel realisasi anggaran, Variabel implementasi berpengaruh signifikan terhadap variabel kebijakan perubahan anggaran, Variabel implementasi tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel

realisasi anggaran, variabel kebijakan perubahan anggaran berpengaruh signifikan terhadap variabel realisasi anggaran, variabel perencanaan anggaran secara tidak langsung melalui kebijakan perubahan anggaran berpengaruh signifikan terhadap realisasi anggaran dan variabel implementasi anggaran secara tidak langsung melalui kebijakan perubahan anggaran berpengaruh signifikan terhadap realisasi anggaran.

Zarinah et al., (2016) melakukan penelitian mengenai "ANGGARAN DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP TINGKAT PENYERAPAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN ACEH UTARA". Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda, untuk menguji pengaruh variabel perencanaan anggaran dan kualitas sumber daya manusia terhadap variabel penyerapan anggaran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran dan kualitas sumber daya manusia secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran SKPD di Kabupaten Aceh Utara.

Julita, (2022) melakukan penelitian mengenai "PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN". Metode analisis data yang digunakan adalah kuantitatif, untuk menguji variabel perencanaan anggaran dan kompetensi sumber daya manusia, terhadap penyerapan anggaran. Hasil dari penelitian ini menunjukkan perencanaan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran, kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan anggaran, serta perencanaan anggaran dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran.

B. Tinjauan Pustaka

1. *Agency Theory*

Agency theory menurut (Jensen & Meckling, 1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai kontrak di mana satu atau lebih orang (prinsipal) melibatkan orang lain (agen) untuk melakukan beberapa hal layanan atas nama mereka yang melibatkan pendelegasian beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Jika kedua belah pihak dalam hubungan tersebut merupakan pemaksimal utilitas, maka hal tersebut akan terjadi alasan yang baik untuk percaya bahwa agen tidak akan selalu bertindak demi kepentingan terbaiknya prinsipal. Prinsipal dapat membatasi perbedaan dari kepentingannya dengan menetapkan insentif yang sesuai untuk agen

dan dengan mengeluarkan biaya pemantauan yang dirancang untuk membatasi aktivitas menyimpang dari agen. Selain itu dalam beberapa situasi hal itu akan terjadi membayar ngenr untuk mengeluarkan sumber daya (biaya pengikatan) untuk menjamin bahwa dia tidak akan melakukannya mengambil tindakan tertentu yang akan merugikan prinsipal atau untuk menjamin bahwa prinsipal akan diberi kompensasi jika dia melakukan tindakan tersebut.

Menurut (Supriyono, 2018) yaitu hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Penggunaa teori keagenan tidak hanya sebatas pada sektor privat (swasta), namun juga telah banyak diterapkan dalam sektor publik (pemerintahan). Dalam penerapan teori keagenan ini memiliki tujuan untuk menganalisis hubungan principal dan agen dalam kaitannya dengan penganggaran sektor publik. Teori keagenan dalam sektor pemerintahan dapat dikaitkan dengan anggapan bahwa satuan kerja merupakan agen dari pemerintah yang dibutuhkan untuk menghasilkan output bagi masyarakat pada tingkatan tertentu (Ferdinan dkk, 2020). Dari teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah adalah prinsipal, dan satuan kerja adalah agen yang ditugaskan oleh kepala untuk melakukan semua tugas atas nama prinsipal. Keduanya bertanggung jawab untuk menghasilkan anggaran yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan bekerja untuk pemerintah, satuan kerja akan berpartisipasi dalam kegiatan penganggaran. Dalam hal ini, satuan kerja akan mengajukan anggaran, yang kemudian akan diproses dan disetujui oleh pemerintah. Ketetapan pengeluaran anggaran adalah kontrak yang dibuat antara pemerintah dan satuan kerja.

2. Anggaran

Anggaran adalah pedoman untuk tindakan yang akan dilakukan pemerintah. Ini mencakup pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, serta rencana, belanja, dan pembiayaan yang diukur dalam mata uang rupiah dan disusun secara sistematis untuk jangka waktu tertentu. Anggaran pemerintah adalah dokumen formal yang merupakan hasil persetujuan antara legislatif dan eksekutif mengenai pendapatan dan pengeluaran yang diharapkan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan atau pengeluaran. Selama periode anggaran, yaitu periode tahunan, anggaran mengatur aktivitas belanja pemerintah dan memberi landasan untuk perolehan pendapatan dan pembiayaan. Anggaran juga dapat didefinisikan sebagai rencana keuangan yang mencakup:

1. Rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain yang dapat meningkatkan kapasitas organisasi dalam pelayanan
2. Perkiraan biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan rencana tersebut
3. Perkiraan sumber mana yang akan menghasilkan pemasukan dan seberapa besar pemasukan tersebut

Menurut Mardiasmo (2011) "Anggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran, sedangkan anggaran adalah pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial".

3. Ketersediaan Kas

(Bierman Jr & Smidt, 2012) dalam bukunya mereka menjelaskan bahwa ketersediaan kas dalam pemerintahan adalah ukuran likuiditas atau kemampuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan kasnya pada saat yang tepat. Menurut Ehrhardt (2011) ketersediaan kas dalam pemerintahan dapat diartikan sebagai jumlah uang tunai yang tersedia untuk memenuhi kewajiban dan kebutuhan pengeluaran pemerintah.

Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh uang tunai yang masuk dan keluar, mencakup investasi yang dapat dicairkan serta dana dalam kas dan rekening bank pemerintah yang mana dapat digunakan untuk memenuhi kewajibannya dalam kegiatan operasional. Karena sangat penting bagi pemerintah untuk memiliki cukup uang untuk membayar tagihan, gaji pegawai, dan kebutuhan operasional lainnya tanpa mengalami kesulitan keuangan. Selain itu, memiliki cukup uang juga dapat memungkinkan pemerintah untuk menangani keadaan darurat atau peluang investasi yang muncul. Pemerintah harus memantau ketersediaan kas dengan cermat, mengantisipasi kebutuhan masa depan, dan melakukan investasi dengan bijak untuk memastikan bahwa uang mereka tetap mencukupi untuk memenuhi semua kewajiban keuangan mereka.

4. Realisasi Anggaran

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintahan, Laporan Realisasi Anggaran memberikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dengan gambaran perbandingan antar anggaran dalam satu periode pelaporan.

Laporan realisasi anggaran disajikan dengan jelas dan menunjukkan komponen biaya operasional dan belanja yang diperlukan untuk penyampaian yang akurat. Ini mencakup membandingkan anggaran yang telah disusun dengan realisasi pengeluaran dan biaya operasional. Catatan laporan keuangan mencakup informasi lebih lanjut tentang laporan realisasi anggaran, yang mencakup semua faktor yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran, seperti kebijakan fiskal dan moneter, perbedaan material antara realisasi dan anggaran, serta daftar rinci angka yang memerlukan penjelasan tambahan.

1.) Manfaat Laporan Realisasi Anggaran

Manfaat informasi Laporan Realisasi Anggaran mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, dan pembiayaan suatu entitas pelaporan dibandingkan dengan anggarannya. Informasi ini berguna bagi pengguna laporan dalam membuat keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomis, akuntabilitas, dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran. Laporan Realisasi Anggaran:
 1. Menyediakan informasi mengenai sumber alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomis
 2. Memberikan informasi menyeluruh tentang realisasi anggaran yang berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efektifitas dan efisiensi pengguna anggaran.
- b. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan Informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomis yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.

2) Tujuan Realisasi Anggaran

Menurut SAP PP Nomor 71 Tahun 2010 dalam PSAP 02, laporan realisasi anggaran dibuat dengan tujuan berikut:

- a. Tujuan dari Standart Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan standar untuk penyajian Laporan Realisasi Anggaran pemerintah untuk memenuhi tujuan akuntabilitas yang ditetapkan oleh hukum.

- b. Tujuan dari Pelaporan Realisasi Anggaran adalah untuk menggabungkan informasi tentang hasil dan anggaran entitas pelaporan. Penbandingan antara anggaran dan pelaksanaannya menunjukkan seberapa jauh target yang telah disepakati oleh legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan telah dicapai.

C. Pengembangan Hipotesis

Hipotesis dapat didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis di antara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji (Sekaran & Bougie, 2016)

1. Anggaran berpengaruh terhadap Realisasi Anggaran

Anggaran digunakan sebagai dana pengelolaan kegiatan yang telah direncanakan yang mencakup pendapatan dan pembiayaan dalam satu periode tertentu. Anggaran merupakan rencana keuangan untuk mencapai tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu. Dalam hipotesis ini berpendapat bahwa seberapa baik anggaran dapat direalisasikan dipengaruhi oleh besarnya anggaran yang dialokasikan. Pada penelitian (Maksum & Firmansyah, 2018) menunjukkan bahwasanya anggaran memiliki pengaruh signifikan terhadap realisasi anggaran pada pemerintah daerah. Anggaran yang disusun dengan baik dan realistis cenderung lebih mudah direalisasikan. Sedangkan pada penelitian (Yusuf & Suranto, 2017) menyatakan bahwa perencanaan anggaran yang matang berhubungan positif dengan efektivitas realisasi anggaran, menunjukkan bahwa anggaran yang direncanakan secara komprehensif akan lebih mudah dilaksanakan.

H1 : Anggaran berpengaruh positif terhadap Realisasi Anggaran

2. Ketersediaan Kas berpengaruh terhadap Realisasi Anggaran

Ketersediaan kas merujuk pada jumlah uang tunai yang tersedia untuk membiayai berbagai kegiatan atau proyek yang telah dianggarkan. Dalam hipotesis ini menyatakan bahwa ketersediaan kas yang memadai akan mempengaruhi kemampuan untuk merealisasikan anggaran yang telah direncanakan. Pada penelitian terdahulu (Prabowo & Haryono, 2016) menunjukkan bahwa ketersediaan kas yang baik mendukung pelaksanaan anggaran yang direncanakan. Mereka mencatat bahwa tanpa ketersediaan kas yang memadai, program-program yang telah dianggarkan mungkin tidak dapat dijalankan secara efektif. Sementara (Sari & Utami, 2019) menyatakan

bahwa ketersediaan kas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap realisasi anggaran, faktor lain, seperti manajemen pengelolaan anggaran, mungkin lebih berpengaruh terhadap realisasi anggaran daripada ketersediaan kas itu sendiri. Penelitian yang dilakukan (Mustakim et al., 2023), hasil penelitian yang telah dilakukan menyatakan ketersediaan kas pada pengelolaan keuangan atau bendahara dimasing-masing SKPD sangat penting untuk optimalisasi realisasi penyerapan anggaran.

H2 : Ketersediaan kas berpengaruh positif terhadap Realisasi Anggaran

3. Anggaran dan Ketersediaan Kas berpengaruh terhadap Realisasi Anggaran

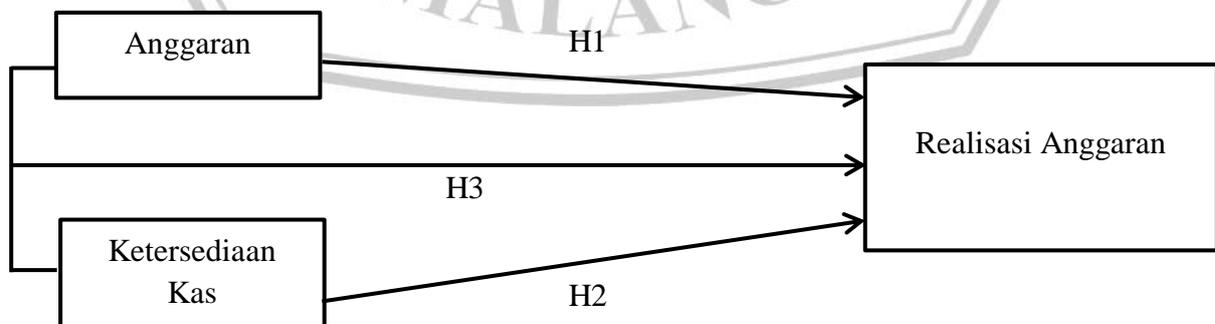
Anggaran dan ketersediaan kas merupakan komponen yang memang saling terikat. Apabila salah satunya tidak terlaksana sesuai dengan fungsinya nantinya program kerja yang harusnya dilaksanakan sesuai dengan jadwal dapat mengalami keterlambatan. Penelitian yang dilakukan oleh (Adam & Seftianova, 2013) bahwa anggaran dan kas yang akurat sangat mendorong terwujudnya peningkatan realisasi anggaran.

Sementara dari penelitian yang dilakukan oleh (Edtiyarsih, 2023) adalah bahwa adanya penyusunan anggaran dan ketersediaan kas memberikan peran krusial dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas.

H3 : Anggaran dan ketersediaan kas berpengaruh positif terhadap Realisasi Anggaran

D. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian dan uraian teoritis, berikut ini disajikan kerangka pemikiran dari penelitian yang dilakukan, yaitu :



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran